

- Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi dan maju pada tahun 2045. Pemerintah telah menyatakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan secara bersamaan mengurangi ketidaksetaraan dengan cara memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dan sektor pendidikan.
- Sebagai bagian dari proyek pengembangan sumber daya manusia nasional, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian pejabat pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah baru. Selain itu juga, mempromosikan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada skala nasional secara khusus dengan melaksanakan pelatihan baik di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di Jepang. Proyek ini juga merupakan bentuk dukungan untuk pengembangan sumber daya manusia dan pembentukan sistem manajemen sumber daya manusia dengan cara berkontribusi pada peningkatan kapasitas organisasi pemerintahan dan promosi reformasi administrasi. Selain itu juga, sebagai wujud pencapaian RPJMN dan pertukaran sumber daya manusia yang sedang berlangsung antara Jepang dan Indonesia

Gambaran Umum Proyek

- Proyek ini terdiri dari (1) pelatihan di luar negeri terutama di Jepang (sekitar 2.640 peserta), (2) pelatihan di Indonesia (sekitar 4.600 peserta) dan (3) pengembangan sistem. Pelatihan (1) dan (2) dilaksanakan untuk sekitar 7.240 pejabat administratif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan daerah-daerah yang tertinggal (misalnya Indonesia Timur dan Kalimantan Utara)
- (i) Pelatihan di luar negeri, terutama di Jepang, untuk pejabat administratif yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, dan akan dilaksanakan di universitas-universitas Jepang dan lembaga-lembaga penelitian lainnya, perusahaan-perusahaan swasta, lembaga-lembaga publik, dan pemerintah daerah. Pelatihan di Indonesia dirancang untuk para pejabat administratif yang bertanggung jawab atas akuntansi dan pengadaan, dll., yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan, dan dijadwalkan berlangsung di lembaga-lembaga publik dan pusat-pusat pelatihan yang berafiliasi dengan universitas di negara ini.
- (iii) Pembangunan sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan konten dari sistem platform ini yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan manajemen petugas administrasi.

[Referensi] Jumlah Maksimum dan Kondisi Pinjaman

Instansi Pelaksana : Bappenas, Center for Planners Development, Education and Training (CPDET))

Jumlah maksimum : 7,048 miliar

Suku bunga : 1.45% (suku bunga tetap, 0,2 % per tahun untuk porsi konsultasi)

Masa Pengembalian : 25 tahun (termasuk grace periode 7 tahun)

Syarat Pengadaan : tidak terikat

[Referensi] Kerja sama hingga saat ini dan posisi proyek ini

- Sejak dimulainya kerja sama ekonomi dengan Pemerintah Jepang pada tahun 1954, JICA telah memberikan pelatihan mengenai berbagai isu pembangunan di Indonesia melalui kerja sama teknis hingga saat ini, dan telah membantu memperkuat kapasitas lebih dari 47.000 pejabat administrasi dan lainnya.
- Sejak tahun 1990, proyek ini juga telah mendukung sekitar 4.500 orang untuk mendapatkan gelar di Jepang dan Indonesia melalui pinjaman yen (dengan biaya). Proyek ini merupakan proyek pengembangan sumber daya manusia berskala besar yang akan dilaksanakan terutama di Jepang dan Indonesia selama tujuh tahun ke depan (rata-rata 1.000 orang per tahun) dengan total sekitar 7.240 pegawai administratif dari seluruh Indonesia, termasuk yang berasal dari daerah pedesaan dan daerah yang kurang berkembang, yang akan memainkan peran penting dalam pemerintahan baru, yang bertujuan untuk mengembangkan Indonesia secara berkelanjutan dan menjadi negara berpenghasilan tinggi dan bergabung dalam OECD.